

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Kawasan kota lama Semarang merupakan kota yang sering mendapat sorotan sebagai salah satu aset pusaka. Kawasan Kota Lama Semarang merupakan peninggalan penjajahan Belanda yang mendapat julukan sebagai Little Netherland. Lokasinya yang dikelilingi kanal-kanal dengan bangunan berlanggam Eropa menjadikan kawasan ini mirip sebuah kota lainnya yang berada di Belanda. Jika dilihat dari sejarah, Kawasan ini merupakan cikal bakal dari pembangunan kota Semarang dan memiliki luas sekitar ± 31 ha. Pada awalnya Kawasan Kota Lama Semarang ini dijadikan sebagai pusat pemerintahan, perkantoran dan perdagangan. Kawasan ini sangat banyak sekali mempunyai nilai sejarah. Pusat dari Kawasan Kota Lama berada di Taman Srigunting, sebuah taman yang terletak di jantung Kawasan Kota Lama Semarang. Masa lalu taman ini adalah sebuah lapangan bernama Parade Plein, besar kemungkinan karena acap kali digunakan untuk Parade militer karena tak jauh dari sana terdapat sebuah barak militer. Sebelum menjadi lapangan, taman ini memiliki fungsi sebagai kerkhof atau pemakaman warga Eropa, sebelum pada awal abad 19 kerkhof dipindah ke daerah pengapon.¹ Secara umum karakter bangunan di wilayah Kota Lama Semarang mengikuti bangunan-bangunan di benua Eropa sekitar tahun 1700-an. Hal ini bisa dilihat dari detail bangunan yang khas dan ornamen-ornamen yang identik dengan gaya

¹ <http://seputarsemarang.com/kota-lama-semarang-little-netherland/> diakses pada 15 Juni 2016

Eropa. Seperti ukuran pintu dan jendela yang luar biasa besar, penggunaan kaca-kaca berwarna, bentuk atap yang unik, sampai adanya ruang bawah tanah. Bangunan-bangunan peninggalan sejarah masa lalu diantaranya Gereja Blenduk, Gedung Marba, Pasar Johar, Gedung Marabunta, dan masih banyak lagi.

Kota Lama yang dulunya merupakan pusat Kota Semarang, dengan bangunan-bangunan yang mengandung nilai sejarah, indah, kini menjadi tak terfungsikan secara optimal. Bangunan-bangunan yang ada sebagian besar terlihat tak terawat, berkesan tak berpenghuni, dan bahkan seakan seperti kota mati karena sepi, hal ini sangat terasa terutama pada malam hari. Selain bangunan fisiknya, kawasan Kota Lama juga semakin tidak terawat dari sisi kebersihan lingkungan alaminya seperti sungai Mberok yang melintasi Kota Lama. Sungai Mberok ini tampak sangat kumuh dan bau, ditambah lagi dengan bangunan liar yang berada di sekitar bantaran kali yang menjadikan kenangan akan kanal kanal yang pernah melintas di kawasan ini terlupakan. Belum lagi terancam dengan tuntutan pembangunan modern yang terjadi di Kota Semarang. Bangunan-bangunan pusaka yang terbengkalai dirubuhkan berganti dengan bangunan - bangunan baru. Hal ini terjadi karena, pemilik bangunan maupun pengembang properti beranggapan bahwa bangunan pusaka tidak memberikan nilai ekonomi. Kota Lama yang sebenarnya sangat strategis untuk fungsi ekonomis dan mix-used mengalami pergeseran fungsi, menjadi kawasan pergudangan maupun permukiman bagi kalangan masyarakat miskin yang memperolehnya secara tidak legal. Citra yang tampak sekarang adalah kawasan Kota Lama dengan gedung-gedung kuno dan kusam. Melihat kondisi yang terjadi pada Kota Lama yang

seperti ini, maka baik Pemerintah dan masyarakat telah berusaha untuk melestarikan keberadaan dan meningkatkan kondisi baik fisik lingkungan, sosial, maupun ekonomi kawasan Kota Lama.

Melihat kondisi yang terjadi pada Kota Lama yang seperti ini, usaha untuk melestarikan keberadaan dan meningkatkan kondisi baik fisik lingkungan, sosial, maupun ekonomi kawasan Kota Lama. Salah satu upaya untuk menghidupkan kembali kawasan Kota Lama Semarang adalah dengan pengembangan kawasan Kota Lama dalam rangka revitalisasi Kota Lama. Revitalisasi merupakan salah satu cara yang dapat digunakan sebagai upaya untuk menghidupkan kembali kawasan, bangunan-bangunan, jalan-jalan dan lingkungan kuno dengan menerapkan fungsi baru dalam penataan arsitektural aslinya untuk meningkatkan kegiatan ekonomi, sosial, pariwisata, dan budaya. Secara umum revitalisasi memiliki makna sebagai pengembalian kembali kawasan dengan memasukan fungsi atau kegiatan baru secara modern. Selain itu juga dapat merangsang kegiatan-kegiatan baru sehingga kawasan menjadi lebih aktif.

Sudah ada peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Revitalisasi yang dilakukan oleh pemerintah kota Semarang, hal itu seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 6/PRT/M/2007 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan serta Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 tahun 2003 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Kota Lama.

Salah satu amanat Perda No. 8 Tahun 2003 adalah perlu dibentuknya Badan Pengelola Kawasan Kota Lama, untuk itu maka diterbitkan Peraturan

Walikota Semarang Nomor 12 Tahun 2007 tanggal 12 Juli 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Kawasan Kota Lama (BPK2L) Semarang dan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 646/7 tanggal 6 Agustus 2011 tentang Pengangkatan Keanggotaan Badan Pengelola Kawasan Kota Lama (BPK2L) Semarang 2011-2013 yang berisi oleh pakar-pakar konservasi cagar budaya, akademisi dan praktisi yang ada di Kota Semarang. Dengan kewenangan untuk melaksanakan sebagian kewenangan konservasi dan revitalisasi Kawasan Kota Lama serta tugas BPK2L adalah mengelola, mengembangkan dan mengoptimalkan potensi Kawasan Kota Lama melalui pelaksanaan konservasi, revitalisasi, pengawasan dan pengendalian Kawasan Kota Lama.

Dalam pelaksanaannya Badan Pengelola Kawasan Kota Lama (BPK2L) ini dinilai kurang berdampak bagi pembangunan kawasan kota lama Semarang. Menanggapi permasalahan tersebut pemerintah selanjutnya Melalui surat keputusan Walikota No 50/204/2016 Perubahan atas keputusan Walikota nomor 053/602/2013 tentang pengangkatan keanggotaan Badan Pengelola Kawasan Kota Lama (BPK2L) masa bhakti 2013-2018. Resmi dikukuhkan oleh Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi di Semarang Contemporary Art Gallery.² Melalui Surat keputusan terbaru itu tertera bahwa Ketua BPK2L yang sekarang adalah Wakil Walikota Semarang Ir. Hj. Hevearita Gunaryanti Rahayu.

² <http://beritajateng.net/hendi-resmi-lantik-pengurus-bpk2l-baru/> diakses pada 15 juni 2016

Berdasarkan Perda no 8 tahun 2003 BAB IV Rencana Pemanfaatan Ruang pasal 9. Pemanfaatan ruang kawasan ditetapkan berdasarkan komposisi fungsi kawasan yaitu :

- a. Fungsi Hunian.
- b. Fungsi Perdagangan dan Perkantoran
- c. Fungsi Rekreasi dan Budaya.

Salah satu upaya revitalisasi yang gencar dilakukan Pemerintah Kota Semarang adalah upaya untuk menghidupkan kembali kawasan, bangunan–bangunan, jalan – jalan dan lingkungan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi, sosial, pariwisata dan budaya dengan melakukan pemanfaatan ruang fungsi rekreasi dan budaya.

Kawasan Kota Lama Semarang menghadapi beberapa tantangan yang kompleks dan multidimensi, terutama dalam mengangkat daya jual kawasan melalui nilai sejarah dan budaya melalui 3 pendekatan, yaitu:

- a. Mempertahankan citra Kawasan Kota Lama
- b. Mendorong kegiatan di dalam Kawasan Kota Lama dengan kegiatan yang mampu meningkatkan ekonomi (prinsip-prinsip *adaptive re-use*).
- c. Penguatan system pengelolaan melalui Badan Pengelola yang mampu bekerjasama dengan para pemangku kepentingan (prinsip-prinsip manajemen yang profesional).

Ketiga pendekatan tersebut harus dilakukan secara sinergi oleh berbagai pihak terkait.

Upaya-upaya yang dilakukan berupa kegiatan yang mengangkat citra kawasan Kota Lama seperti Car Free Night and Day, Symphonie Kota Lama, serta even nasional maupun internasional. Sebenarnya dilihat dari antusiasme masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan yang sifatnya sporadis di Kota Lama, upaya ini cukup berhasil. Akan tetapi, setelah kegiatan berakhir maka Kota Lama kembali menjadi kawasan yang sepi dan mati.

Program revitalisasi merupakan bagian dari strategi dan program pembangunan kepariwisataan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Semarang. Revitalisasi Kawasan Kota Lama Semarang merupakan perwujudan dukungan sepenuhnya terhadap pelestarian obyek wisata dan budaya sekaligus upaya pemberdayaan potensi Kota Semarang sebagai salah satu kawasan pariwisata sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan pada penyelenggaraan, pengembangan dan pemberdayaan aset-aset Pemerintah Kota Semarang.

Sebagai sebuah kota peninggalan Kolonial yang penuh sejarah dan menjadi awal berkembangnya kota Semarang, semestinya Kota Lama Semarang ini mampu mendukung pariwisata Kota Semarang. Kawasan Kota Lama memiliki kekayaan historis yang tidak ternilai. Apabila dapat dimanfaatkan dan dikelola secara maksimal, keberadaan gedung – gedung tua di Kawasan Kota Lama mempunyai nilai ekonomis dan historis yang juga dapat digunakan untuk daerah kunjungan wisata. Keberhasilan suatu program revitalisasi Kawasan Kota Lama

tentu tidak akan luput dari sebuah perencanaan matang yang melalui berbagai tahapan, demi terciptanya suatu kondisi yang diinginkan.

Oleh karena itu, dari uraian diatas penulis memilih tema “**Kajian Implementasi Program Revitalisasi Kawasan Kota Lama sebagai kawasan Pariwisata di Kota Semarang**”. Pemilihan tema ini bertujuan agar kita dapat mengetahui bagaimana Implementasi Program Revitalisasi Kawasan Kora Lama Semarang dan menganalisisnya sebagai salah satu kawasan Pariwisata di Kota Semarang.

1.2 Rumusan masalah

Guna memberikan arah dan panduan mengenai bahasan yang dikaji dalam suatu penelitian, perumusan masalah sebagai sebuah konsepsi permasalahan yang akan di cari jawabannya perlu ditentukan terlebih dahulu. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

- 1.2.1 Bagaimanakah implementasi program revitalisasi Kawasan Kota Lama sebagai kawasan Pariwisata di Kota Semarang ?
- 1.2.2 Apa sajakah hambatan dan faktor pendorong dalam implementasi program revitalisasi Kawasan Kota Lama Semarang sebagai kawasan Pariwisata di Kota Semarang ?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Mengetahui implementasi program revitalisasi Kawasan Kota Lama sebagai kawasan Pariwisata di Kota Semarang
- 1.3.2 Mengetahui hambatan dan faktor pendorong implementasi program revitalisasi Kawasan Kota Lama sebagai kawasan Pariwisata di Kota Semarang

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian tentang Kajian implementasi program revitalisasi Kawasan Kota Lama Semarang ini berguna bagi Pemerintah Kota semarang, bagi masyarakat, dan bagi peneliti.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian yang berjudul Kajian implementasi program revitalisasi Kawasan Kota Lama Semarang adalah untuk pengembangan khasanah ilmu pengetahuan dan penyelesaian gejala politik social dan budaya yang berkenaan dengan kebijakan pemerintah mengenai upaya revitalisasi Kota Lama Semarang, serta penelitian ini juga bermanfaat secara teoritis bagi peneliti selanjutnya.

1.4.2 Manfaat bagi Pemerintah Kota Semarang

Bagi Pemerintah Kota Semarang, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan dasar referensi untuk menambah konsep-konsep dalam hal implementasi program revitalisasi Kawasan Kota Lama Semarang yang dianggap tepat dan mampu dilaksanakan. Di samping itu penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan pembantu evaluasi kebijakan terkait, sehingga Pemerintah Kota Semarang mengetahui tentang sejauh mana kebijakan upaya revitalisasi Kota Lama Semarang dapat bermanfaat dan mencapai tujuan yang ditetapkan.

1.4.3 Manfaat bagi Masyarakat

Bagi masyarakat, penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan wawasan agar masyarakat mampu memahami arti pentingnya upaya revitalisasi Kota Lama Semarang. Di samping itu masyarakat juga dapat mengamati dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kota Semarang, dalam hal ini adalah kebijakan yang telah dikeluarkan untuk mengatur upaya revitalisasi kota lama semarang.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Penelitian Terdahulu

- a. Skripsi oleh Agastya Grahadwiswara, tentang pengelolaan kawasan kota lama Semarang. Pengelolaan kawasan ini melalui Perda Nomor 8 Tahun 2003 dengan membentuk Badan Pengelola Kawasan Kota Lama Semarang (BPK2L) hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan Kawasan Kota Lama di laksanakan dengan kurang baik, badan yang dibentuk untuk melakukan pengelolaan BPK2L (Badan Pengelola Kawasan Kota Lama) belum dapat dijalankan dengan baik karena tidak mendapat dukungan pemerintah dalam melaksanakan tugasnya tersebut. Wewenang BPK2L masih tumpang tindih dengan dinas-dinas terkait. Anggaran pun juga menghambat didalam Pengelola Kawasan Kota Lama, nampaknya Pemerintah Kota Semarang belum terlalu komitmen dan serius, dari hasil penelitian terbukti tidak masuknya anggaran revitalisasi maupun kegiatan konservasi di Kawasan Kota Lama Semarang. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah dimana penelitian sebelumnya hanya berfokus pada proses implementasi perda no 8 tahun 2003, tetapi penelitian ini berfokus pada pengelolaan kawasan kota lama dalam pengembangan pariwisata. Dan Dalam pelaksanaannya Badan Pengelola Kawasan Kota Lama (BPK2L) ini telah melakukan beberapa kali pergantian kepengurusan yang dinilai kurang berdampak bagi pembangunan kawasan kota lama Semarang.

Melalui surat keputusan Walikota No 50/204/2016 Perubahan atas keputusan Walikota nomor 053/602/2013 tentang pengangkatan keanggotaan Badan Pengelola Kawasan Kota Lama (BPK2L) masa bhakti 2013-2018. Melalui Surat keputusan terbaru itu tertera bahwa Ketua BPK2L yang sekarang adalah Wakil Walikota Semarang Ir. Hj. Hevearita Gunaryanti Rahayu.

- b. Penelitian terdahulu Skripsi oleh Bhakti Sulistyio. Tentang pengelolaan kawasan kota lama Semarang. Konservasi bangunan bersejarah kawasan kota lama semarang. HASIL penlelitian yang dilaksanakan mengenai kebijakan Revitalisasi dan konservasi bangunan bersejarah, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaannya masih lambat. Masih banyak program-program yang belum dijalankan. Dan pada penelitian ini masih dilaksanakan penyusunan tentang Grand Design Kota Lama Sehingga terlihat Program yang dijalankan belum terukur dan masih lambat dalam pelaksanaannya.

1.5.2 Teori Kebijakan

Dalam mengadakan penelitian implementasi kebijakan publik terlebih dahulu memahami tentang kebijakan. Pendefinisian mengenai kebijakan diperlukan agar kita dapat menjaga kejelasan pemikiran kita dalam pembahasan selanjutnya. Kebijakan adalah salah satu konsep dalam ilmu politik.³ Kebijakan (*policy*) adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih

³Miriam Budiardjo. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : PT.Gramedia Pustaka, 2009), hal.2

tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan⁴.

1.5.3 Teori Kebijakan Publik

Lalu juga setelah memahami tentang kebijakan, peneliti juga harus memahami arti dari kebijakan publik itu sendiri, karena lingkup pembahasan yang akan diteliti nantinya adalah mengenai kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah daerah. Menurut Thomas Dye (1981:1), kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan konsep yang sangat luas mencakup sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah maupun tidak dilakukan atas sebuah masalah public. Sedangkan James E. Anderson (1979:3) mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah. Walaupun disadari bahwa kebijakan publik dapat dipengaruhi oleh actor dan faktor dari luar pemerintah⁵. Dalam studi kebijakan public terdapat dua pendekatan, yakni: Pertama dikenal dengan istilah analisis kebijakan dan kedua kebijakan public politik (Hughes, 1994:145).⁶ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan pertama yaitu analisis kebijakan publik. Proses analisis kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat

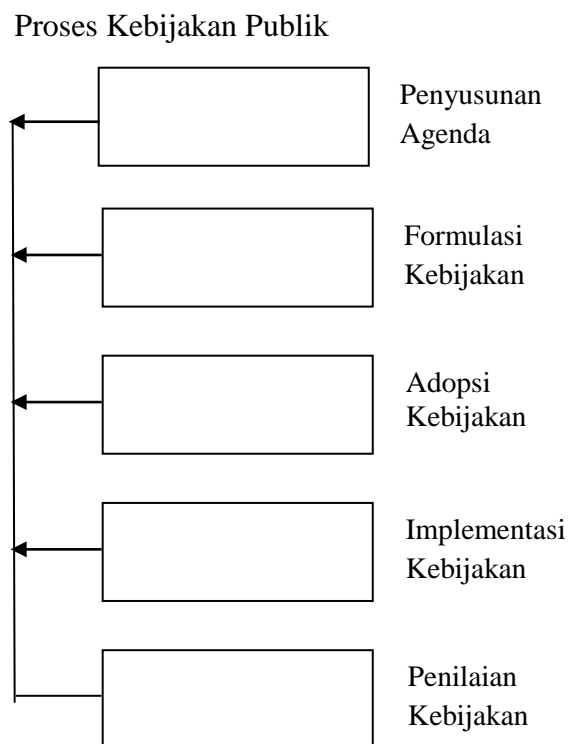
⁴*Ibid*, Hal.20

⁵Subarsono, AG. (2013), Analisis Kebijakan Publik : Konsep , Teori dan Aplikasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Hal 2

⁶*Ibid*, Hal.7

politis. Aktivitas politis tersebut nampak dalam serangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Sedangkan aktivitas perumusan masalah, forecasting, rekomendasi kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan adalah aktivitas yang lebih bersifat intelektual (Gambar 1.1).⁷

Gambar 1.1



Sumber : William N. Dunn, 1994:17

Kebijakan publik merupakan respon komunikasi dua arah terhadap kondisi atau permasalahan yang segera diselesaikan. Dalam penelitian ini. Kebijakan publik yang dimaksud yaitu

⁷*Ibid*, Hal 8

pernyataan regulasi kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemkot Semarang berkenaan dengan Upaya Revitalisasi Kawasan Kota Lama Semarang sebagai upaya untuk pengembangan kota Semarang. Regulasi tersebut adalah PERDA No 8 tahun 2003 tentang rencana tata bangunan dan lingkungan. Regulasi tersebut dibuat oleh pemerintah kota yaitu walikota bersama dewan perwakilan rakyat daerah Semarang. Sebagai salah satu bentuk regulasi kebijakan publik di tingkat lokal. Dalam pengkajian kebijakan publik ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti identifikasi dan hubungan isu-isu politik baik masa lalu, sekarang dan masa yang akan datang, serta stakeholders atau aktor kunci yang turut memberikan masukan yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial.

1.5.4 Teori Implementasi Kebijakan

Setelah mengetahui tentang pengertian dari kebijakan dan kebijakan publik yang sangat penting untuk mengetahui mengenai implementasi kebijakan, peneliti kembali memfokuskan teori yang akan diadopsi dalam penelitian tentang Upaya Revitalisasi Kawasan Kota Lama Semarang. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pendekatan-pendekatan yang diadopsi dari teori-teori implementasi kebijakan. Kebijakan yang telah direkomendasikan untuk dipilih oleh *policy makers* bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti berhasil dalam implementasinya. Ada banyak variable yang mempengaruhi keberhasilan

implementasi kebijakan baik yang bersifat individual maupun kelompok atau institusi. Dalam berbagai sistem politik, kebijakan publik diimplementasikan oleh badan-badan pemerintah. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah dari hari ke hari yang membawa dampak pada warganegaranya.

Implementasi melibatkan usaha dari *policy makers* untuk mempengaruhi apa yang oleh Lipsky disebut “*street level bureaucrats*” untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku perilaku kelompok sasaran.⁸ Untuk kebijakan yang sederhana, implementasi hanya melibatkan satu badan yang berfungsi sebagai implementor, dan untuk kebijakan yang makro seperti Upaya Revitalisasi Kawasan Kota Lama Semarang yang akan diteliti, maka usaha-usaha implementasi akan melibatkan berbagai instansi dari mulai pemerintah kota sampai kelurahan bahkan rt dan rw. Kompleksitas implementasi bukan saja ditunjukkan oleh banyaknya aktor atau unit organisasi yang terlibat, tetapi juga dikarenakan proses implementasi dipengaruhi oleh berbagai variable yang kompleks baik individual maupun organisasional dan saling berinteraksi satu sama lain. Banyak uraian yang membahas mengenai bagaimana terdapat variable-variabel yang saling berhubungan dalam implementasi kebijakan.⁹Dari banyak uraian tersebut, peneliti memilih dua teori implementasi dalam penelitian ini, teori tersebut dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn (1975).

⁸*Ibid*, Hal. 87-88

⁹*Ibid*, Hal. 89

A. Teori Van Meter dan Van Horn (1975).

Menurut Meter dan Horn, ada lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni sebagai berikut :

- (1) Standar dan sasaran kebijakan. Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multiinterpretasi dan mudah menimbulkan konflik diantara para agen implementasi
- (2) Sumberdaya. Implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya baik sumberdaya manusia maupun non manusia. Dalam berbagai kasus program pemerintah banyak yang kurang berhasil justru diakibatkan karena keterbatasan kualitas aparat pelaksana
- (3) Hubungan antar Organisasi. Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program
- (4) Karakteristik agen pelaksana. Yang dimaksud karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan memengaruhi implementasi suatu program

- (5) Kondisi sosial, politik dan ekonomi. Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan: sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan; dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan
- (6) Disposisi implementor. Disposisi implementor ini mencakup tiga hal yang penting, yakni: (a) respons implementor terhadap kebijakan, yang akan memengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan; (b) kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan; dan (c) intensitas disposisi implementor yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.¹⁰

Dari teori yang telah dikemukakan mengenai factor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan dapat dikatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh variabel atau faktor yang saling berhubungan satu sama lain. Serta teori yang dikemukakan oleh pakar di atas nantinya akan dijadikan sebagai kunci pembahasan penelitian ini, serta konsep-konsep analisis kebijakan yang nantinya akan digunakan

¹⁰*Ibid*, Hal. 99-101

sebagai pendekatan dari substansi yang akan dijabarkan di dalam isi pembahasan.

1.5.5 Manajemen Pariwisata

Manajemen Pariwisata adalah suatu tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya dalam bidang pariwisata. Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan orang untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain meninggalkan tempatnya semula, dengan suatu perencanaan dan dengan maksud bukan untuk berusaha atau mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati kegiatan pertamasyaan dan rekreasi atau untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam. Suatu perjalanan dapat dikatakan sebagai perjalanan wisata apabila memenuhi persyaratan:

- a. Bersifat sementara
- b. Bersifat sukarela atau tidak dipaksa
- c. Tidak bekerja yang sifatnya menghasilkan upah atau uang

Manajemen pariwisata haruslah mengacu pada prinsip-prinsip pengelolaan yang menekankan nilai-nilai kelestarian lingkungan alam, komunitas, dan nilai sosial yang memungkinkan wisatawan menikmati kegiatan wisatanya serta bermanfaat bagi kesejahteraan komunitas lokal.

Menurut Cox manajemen pariwisata harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut¹¹:

1. Pembangunan dan pengembangan pariwisata haruslah didasarkan pada kearifan lokal dan *special local sense* yang merefleksikan keunikan peninggalan budaya dan keunikan lingkungan
2. Preservasi, proteksi, dan peningkatan kualitas sumberdaya yang menjadi basis pengembangan pariwisata.
3. Pengembangan atraksi wisata tambahan yang mengakar pada khasanah budaya lokal.
4. Pelayanan kepada wisatawan yang berbasis pada keunikan budaya dan lingkungan lokal.
5. Memberikan dukungan dan legitimasi pada pembangunan dan pengembangan pariwisata jika terbukti memberikan manfaat positif, tetapi sebaliknya mengendalikan atau menghentikan aktivitas pariwisata tersebut jika melampaui ambang batas lingkungan alam sosial walaupun disisi lain mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.

¹¹Pitana, I Gde, dan Surya Diarta, I Ketut. 2009. Pengantar Ilmu Pariwisata. Penerbit Andi. Yogyakarta. Hal, 81

Secara lebih detail Liu menyatakan bahwa manajemen pariwisata dapat berperan strategis untuk fungsi-fungsi berikut¹²:

1. Perlindungan terhadap sumberdaya alam dan lingkungan

Umumnya pengembangan kawasan wisata akan diikuti oleh degradasi sumberdaya yang diakibatkan oleh pertumbuhan dan pengembangan industri wisata yang ekstensif dan tidak terkendali, serta cepatnya pertumbuhan penduduk dikawasan tersebut sebagai konsekuensi logis dari kesempatan berusaha yang ditimbulkan. Pariwisata jika dikelola dengan baik mampu menyediakan solusi ekonomi untuk proteksi sumberdaya alam dan lingkungan.

2. Keberlanjutan ekonomi

Kecendrungan industrialisasi dan perkembangan ekonomi global akan mengarah pada kesaling ketergantungan pada produk impor yang menguras devisa Negara. Pengembangan pariwisata menjadi salah satu solusi masalah tersebut dengan menyediakan produk ekspor yang tidak lari keman-mana sebagai sumber devisa.

3. Peningkata integritas budaya

Aspek ekologi dalam pariwisata menyiratkan sbuah hubungan timbal balik antara wisatawan dan komunitas lokal yang melibatkan dialog

¹²Ibid. Hal, 84-85

budaya yang berdasarkan penghormatan terhadap eksistensi dan integritas masing-masing.

4. Nilai pendidikan dan pembelajaran

Keberlanjutan dan kelestarian sebuah kawasan wisata tergantung kepada bagaimana membangkitkan pemahaman dan kepedulian terhadap pentingnya kontribusi, eksistensi, perlindungan terhadap sumberdaya pendukung pariwisata.

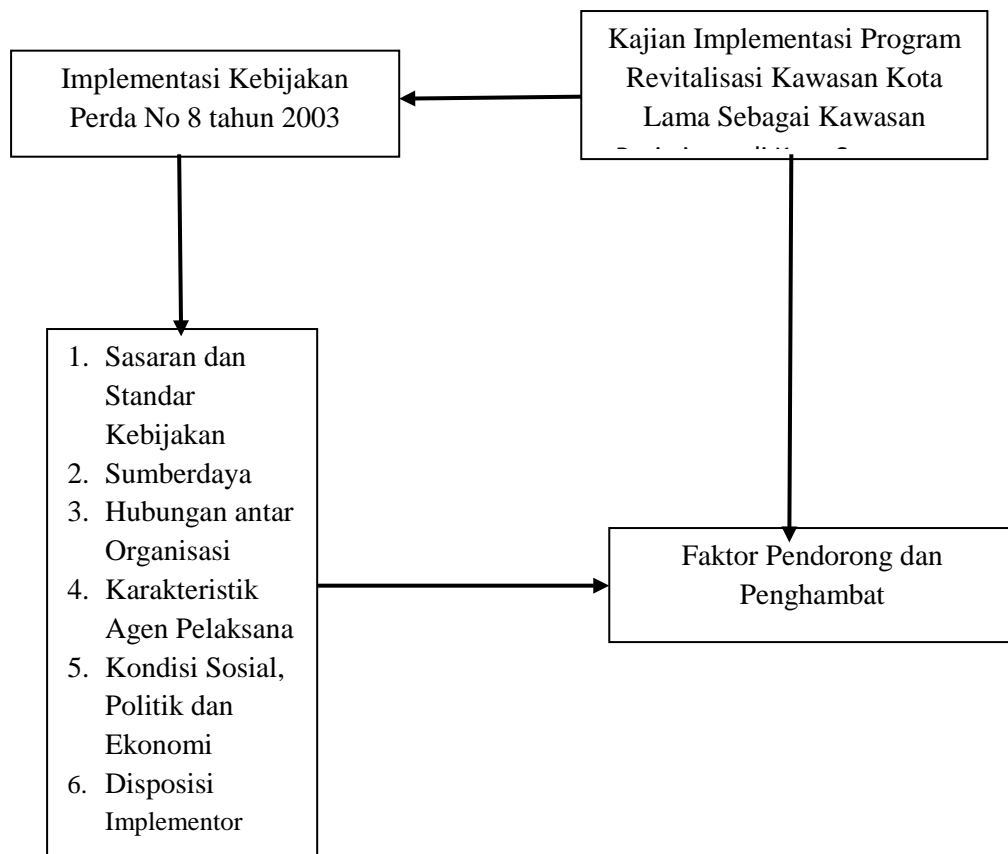
Menurut Richardon dan Fluker yang harus dicakup dalam manajemen pariwisata paling tidak terfokus pada konsep *values tourism* yang diluncurkan pada tahun 1995 oleh *The Pacific Asia Travel Association* yaitu¹³

1. Memenuhi kebutuhan konsumen (wisatawan)
2. Meningkatkan kontribusi ekonomi bagi nasional Negara yang bersangkutan
3. Meminimalisasi dampak pariwisata terhadap lingkungan
4. Mengakomodasi kebutuhan dan keinginan Negara tuan rumah yang menjadi tujuan wisata
5. Menyediakan pengembalian finansial yang cukup bagi orang-orang yang berusaha di pariwisata

¹³Pitana, I Gde, dan Surya Diarta, I Ketut. 2009. Pengantar Ilmu Pariwisata. Penerbit Andi. Yogyakarta. Hal, 86

1.6 Operasional Konsep

Gambar 1.2
Kerangka Konseptual



Sumber : Oleh data Peneliti tahun 2017

1. Revitalisasi kawasan kota lama

Revitalisasi merupakan salah satu cara yang dapat digunakan sebagai upaya pelestarian pusaka kota. Secara umum revitalisasi memiliki makna sebagai pengembalian kembali kawasan dengan memasukan fungsi atau kegiatan baru secara modern. Selain itu juga dapat merangsang kegiatan-kegiatan baru sehingga kawasan menjadi lebih aktif. Revitalisasi dipercaya sebagai bentuk upaya pelestarian dan pengembangan pusaka kota. Pemerintah Kota Semarang telah melakukan berbagai upaya, salah satu wujudnya ialah PERDA no 8 tahun 2003 tentang Rencana tata bangunan dan lingkungan kota lama semarang dalam Perda ini mengatur upaya merevitalisasi kawasan kota lama semarang, serta membentuk Badan Pengelola Kawasan Kota Lama (BPK2L) dengan tujuan menjalankan Perda tahun 2003 dalam mengelola, mengembangkan, dan mengoptimalkan potensi kawasan Kota Lama Semarang.

2. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan baik itu oleh pemerintah maupun organisasi untuk merealisasikan yang terarah untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan dalam putusan kebijakan. Masalah yang paling penting dalam implementasi kebijakan yaitu memindahkan suatu keputusan menjadi sebuah kegiatan (program) dengan cara tertentu.

3. Implementasi Kebijakan Revitalisasi Kawasan Kota Lama

Kebijakan Revitalisasi Kawasan Kota Lama dalam penerapannya membutuhkan implementasi yang tepat. Implementasi yang tepat meliputi:

a. Standar dan sasaran kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan Revitalisasi kawasan kota lama adalah menghidupkan kembali kawasan, bangunan-bangunan, jalan-jalan dan lingkungan kuno dengan menerapkan fungsi baru dalam penataan arsitektural aslinya untuk meningkatkan kegiatan ekonomi, sosial, pariwisata, dan budaya.

b. Sumberdaya baik itu sumberdaya manusia (*human resources*)

maupun sumberdaya non-manusia (*non-human resources*), salah satu sumberdaya yang mempengaruhi disini adalah para aparat pelaksana dari kebijakan Revitalisasi Kawasan Kota, pakar-pakar konservasi cagar budaya, akademisi dan praktisi.

c. Hubungan antar organisasi, Badan Pengelola Kawasan Kota

Lama (BPK2L) sebagai satuan kerja yang menjalankan kebijakan Revitalisasi kawasan kota lama menjalin kerjasama dengan instansi lain termasuk Dinas Pariwisata Kota Semarang.

d. Karakteristik agen pelaksana, mencakup struktur birokrasi,

norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi.

e. Disposisi implementor, dan respons implementor terhadap

kebijakan, yang akan memengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan; (b) kognisi, yakni pemahamannya

terhadap kebijakan; dan (c) intensitas disposisi implementor yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.¹⁴

- f. Lingkungan kondisi sosial, ekonomi dan politik dari Kota Semarang itu sendiri. Kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan; dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan

| No | Variabel | Fokus Penilaian | Parameter |
|----|-------------------------------|---|---|
| 1 | Standar dan sasaran kebijakan | Menghidupkan kembali kawasan, bangunan-bangunan, jalan-jalan dan lingkungan kuno dengan menerapkan fungsi baru untuk meningkatkan kegiatan ekonomi, sosial, pariwisata, dan budaya. | Kesesuaian rencana dengan Implementasi |
| 2 | Sumberdaya | Para aparat, pakar-pakar konservasi cagar budaya, akademisi dan praktisi. | Sinergisitas antar golongan memunculkan Kualitas Sumberdaya |
| 3 | Hubungan antar organisasi | BP2KL (Badan Pengelola Kawasan Kota Lama) menjalin komunikasi dengan lembaga lainnya. | Terjalannya koordinasi dan kerjasama antar |

¹⁴*Ibid*, Hal. 99-101

| | | | |
|---|------------------------------------|---|---|
| | | | instansi guna keberhasilan program |
| 4 | Karakteristik agen pelaksana | Mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi. | Tugas pokok dan fungsi, hubungan dan wewenang. |
| 5 | Disposisi implementor | Respons implementor terhadap kebijakan | Kesesuaian tujuan dengan hasil |
| 6 | Lingkungan eko,sospol. | Karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan | Kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan |

Enam variabel tersebut saling mempengaruhi untuk menuju kinerja implementasi yang mewujudkan kebijakan Revitalisasi kawasan kota lama dapat berhasil dijalankan.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Desain Penelitian

Pada penelitian tentang Upaya Revitalisasi Kawasan Kota Lama Semarang, peneliti akan menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai sebuah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu fenomena/peristiwa secara sistematis sesuai dengan apa adanya¹⁵. Penelitian deskriptif dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai keadaan saat ini. Sedangkan pemahaman deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada¹⁶. Metode yang dijelaskan demikian diharapkan nantinya dapat membantu peneliti dalam mengkaji dan menganalisis data maupun temuan lainnya selama melakukan penelitian di Kota Semarang mengenai Upaya Revitalisasi Kawasan Kota Lama Semarang, berjalannya sebuah perda yang telah dibuat akan dianalisis realita penerapan tentang fenomena yang diatur saat dibuat, maupun setelah dibuatnya perda tersebut.

1.7.2 Situs Penelitian

Dalam penelitian ini, situs penelitian yang akan diteliti ialah pada instansi pemerintahan, yakni Badan Pengelolaan Kawasan Kota Lama Semarang (BPK2L) sebagai lembaga non struktural yang keanggotannya

¹⁵Prof. Dr. Nyoman Dantes. 2012. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit Andi. (Hlm.51).

¹⁶Satori, Djam'an dan Aan Komariah. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA. (Hlm. 23)

melibatkan unsur Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekertaris Daerah, yang diketahui merupakan Satuan Kerja dan yang menjalankan tugasnya dalam bidang yang terkait dengan peneltian ini, yakni tentang Upaya Revitalisasi Kawasan Kota Lama Semarang. Diketahui bahwa Kota Semarang telah membuat perda tentang Rencana tata bangunan dan lingkungan kawasan kota lama, dimana peneliti akan meneliti pada sub unsur yang dibahas di dalamnya. Melalui penelitian yang dilakukan di instansi tersebut yang tentunya dengan mekanisme dan pilihan sasaran tertentu, maka peneliti diharapkan dapat memperoleh informasi-informasi yang berkenaan dengan penelitian ini.

1.7.3 Subjek Penelitian

Subjek Penelitian merupakan informan yang akan dimintai keterangan mendalam mengenai peneltian tentang Upaya Revitalisasi Kawasan Kota Lama Semarang. Selain itu, peneliti juga akan melakukan pengamatan dari hasil temuan berupa data yang diperoleh saat melakukan observasi di lapangan (baik di luar maupun di dalam) instansi tersebut. Dengan demikian, akan diketahui aspek-aspek yang dianggap penting dan dapat membantu melengkapi data yang akan diolah dan dikaji dalam penelitian ini. Karena hal itulah subject dalam penelitian ini diantaranya adalah:

1. Badan Pengelola Kawasan Kota Lama (BP2KL)
2. BAPPEDA Kota Semarang
3. Dinas Pariwisata Kota Semarang
4. Dinas Tata Ruang Kota Semarang
5. Masyarakat dan Wisatawan, Komunitas

1.7.4 Jenis Data

Menurut Lofland (1984:47) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain¹⁷. Berkaitan dengan hal itu maka jenis data yang digunakan dalam penelitian Upaya Revitalisasi Kawasan Kota Lama Semarang ini dapat berupa kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto serta diagram statistik yang relevan dengan tema penelitian. Hal ini dapat di peroleh dari subjek dan objek penelitian.

1.7.5 Sumber Data

Data pada penelitian ini akan bersumber dari data primer dan data sekunder¹⁸.

- a. Data primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti dengan cara mengumupulkan data secara mandiri oleh peneliti langsung dari informan penelitian utama atau tempat objek penelitian tanpa perantara.

¹⁷ Dr. Lexy J. Moleong. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Bandung : Remaja Rosdakarya. (Hlm. 112)

¹⁸ Anonim. *Eprints.walisongo.ac.id/761/4/082411129_Bab3.pdf*. diunduh pada 15 juni 2016.

- b. Data sekunder yaitu data-data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya. Data sekunder ini berasal dari informasi-informasi di berbagai media, serta bisa juga berasal dari internet. Untuk kemudian menjadi data tambahan dan penguat bagi data primer yang telah di susun.

1.7. 6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, peneliti akan menggunakan beberapa metode untuk mendapatkan informasi yang jelas. Beberapa metode tersebut adalah :

- a. Wawancara terstruktur (*Structured interview*), yaitu menanyakan pertanyaan dengan format terbuka, mendengarkan, dan merekamnya dan kemudian menindaklanjuti dengan pertanyaan tambahan yang terkait¹⁹. Wawancara terstruktur (*Structured interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil tatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan menggunakan pedoman (*guide*) wawancara. Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden diberikan pertanyaan yang sama, dan pengumpul data mencatatnya.²⁰

¹⁹Michael Quinn Patton. 2009. *Metode Evaluasi Kualitatif*. Bab 5. Yogyakarta. (Hlm.182)

²⁰ Prof. Dr. Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- b. Dokumen menurut Guba dan Lincoln (1981:228)²¹ adalah setiap bahan yang tertulis atau film baik yang dipersiapkan untuk penelitian, pengujian suatu peristiwa atau *record*. Pada dasarnya dokumen sebagai sumber data terdiri dari dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dokumen merupakan metode pengumpulan data dengan mengumpulkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- c. Observasi dalam penelitian kualitatif menurut Ratcliff, D (2001: 75)²² dibagi menjadi tiga observasi yaitu :
1. Observasi partisipasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan dimana observer atau peneliti benar-benar terlibat dalam keseharian responden.
 2. Observasi tidak terstruktur adalah observasi yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman observasi. Pada observasi ini peneliti harus mampu mengembangkan daya pengamatannya dalam mengamati suatu obyek.
 3. Observasi kelompok adalah observasi yang dilakukan secara berkelompok terhadap suatu atau beberapa obyek sekaligus.

Dalam kasus ini, peneliti akan menggunakan sebagian metodenya dengan observasi tidak terstruktur karena peneliti akan mengamati hasil-

²¹ Dr. Basrowi, M.Pd. Dr. Suwandi, M.Si., 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta. (Hlm.159).

²² Pupu Saeful Rahmat. *Op. cit.*.

hasil temuan di lapangan, yang mengaitkan data yang diperoleh dengan realita yang ada di lapangan mengenai upaya revitalisasi kawasan kota lama semarang.

1.7.7 Analisis dan Intrepetasi Data

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah utuk kemudian dijadikan susunan yang padu dalam penelitian kualitatif. Setelah data terkumpul, peneliti akan melakukan pemilahan dan penyusunan klasifikasi data. Mana data yang memang diperlukan dalam menunjang kasus ini, dan mana yang tidak menunjang data ini. Kemudian setelah dilakukan proses pemilahan, akan dilakukan pemberian kode data untuk membangun kinerja analisis data. Setelah itu melakukan pendalaman data dan langkah terakhir adalah melakukan analisis data sesuai dengan konstruksi pembahasan hasil penelitian nantinya.

Miles dan Huberman (1994)²³ mengemukakan bahwasannya teknik analisis data itu mencakup tiga kegiatan, yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian dan pentransformasian data kasar dari lapangan. Proses ini berlangsung dari awal sampai akhir penelitian (selama penelitian dilakukan) untuk memperoleh data yang benar-benar valid dengan cara menajamkan, menggolongkan, mengarahkan serta membuang data yang tidak perlu. Reduksi data ini penelitian benar-benar menyangsikan

²³ Dr. Basrowi, M.Pd. Dr. Suwandi, M.Si. *Op. cit.*, (Hlm.209).

kebenaran data yang diperoleh dan akan dicek ulang kembali dengan informan lain yang dirasa peneliti lebih mengetahui.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam tahap ini peneliti juga melakukan display (penyajian) data secara sistematis agar interaksi antar bagian mudah dipahami dalam konteks yang utuh berdasarkan klasifikasi tema-tema ini. Tujuannya adalah agar memudahkan membaca dan menarik kesimpulan sehingga sajian datanya harus tertata secara rapi.

c. Menarik Kesimpulan dan Verifikasi

Menarik kesimpulan berarti membuat rumusan proposisi yang terkait dengan prinsip logika, mengangkatnya sebagai temuan penelitian, kemudian dilanjutkan dengan mengkaji secara berulang-ulang terhadap data yang ada, mengelompokkan data yang telah terbentuk, dan proposisi yang telah dirumuskan. Kemudian setelah itu adalah membuat laporan hasil penelitian yang lengkap.

1.7.8 Kualitas Data

Metode selanjutnya untuk mengukur keakuratan data yaitu dengan menggunakan metode triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain.²⁴ Denzin (1978) membedakan empat macam triangulasi sebagai berikut:

a. Triangulasi Sumber Data

Menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi, atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subyek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda.

b. Triangulasi Pengamat

Adanya pengamat diluar peneliti yang turut memeriksa hasil pengumpulan data. Dalam penelitian ini, dosen pembimbing bertindak sebagai pengamat (expert judgement) yang memeberikan masukan terhadap hasil pengumpulan data.

c. Triangulasi Teori

Penggunaan berbagai teori yang berlainan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sudah memasuki syarat. Pada penelitian ini berbagai teori yang telah dijelaskan bertujuan untuk dipergunakan dan menguji terkumpulnya data. triangulasi teori dapat meningkatkan kedalaman pemahaman asalkan peneliti mampu menggali pengetahuan teoretik secara mendalam atas hasil analisis data yang telah diperoleh.

²⁴ Moelong Lexy. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya. (Hlm. 330)

d. Triangulasi metode

Penggunaan berbagai metode untuk meneliti suatu masalah. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan metode wawancara dan observasi atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya.

Pada penelitian ini, menggunakan teknik triangulasi yang memanfaatkan penggunaan sumber data. Triangulasi dengan sumber data berarti dengan cara membandingkan dan mengecek kebenaran informasi yang didapat dari satu sumber dengan sumber yang lain. Hal tersebut dapat dicapai jalan²⁵ :

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
- b. Membandingkan apa yang dikatakan yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang – orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu
- d. Membandingkan keadaan dan keadaan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang-orang dari berbagai elemen masyarakat
- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan

²⁵*Ibid.* (Hlm. 331)

Dengan memperhatikan proses dan temuan dalam triangulasi tersebut nantinya akan menjadi bahan yang dapat membantu penyempurnaan data. Untuk kesempurnaan penelitian, maka dilakukan perbandingan atas data-data yang diperoleh, tambal sulam yang dilakukan untuk memenuhi indikator-indikator dalam menganalisis sehingga hasil penelitian yang berupa data dapat disajikan dengan baik.